

**DAULAH ISLAMIYAH  
(STUDI KOMPARASI ANTARA PEMIKIRAN  
HASAN AL-BANNA DAN YUSUF AL-QARADAWI)**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

**PUAD MAWARDI**

**NIM : 99363837**

**PEMBIMBING:**

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005/1426**

**Drs. H. Fuad Zein, M.A.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Puad Mawardi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan  
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Puad Mawardi

NIM : 99363837

Judul :Daulah Islamiyah ( Studi Komparasi Antara Pemikiran  
Hasan al-Banna dan Yusuf al-Qaradawi)

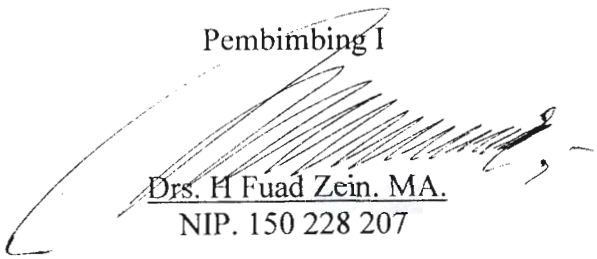
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana  
dalam jurusan Perbandingan Nazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi ini saudara tersebut di atas untuk segera  
dimunaqashahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Dzul qaidah 1425 H  
3 Januari 2005 M

Pembimbing I

  
Drs. H Fuad Zein, MA.  
NIP. 150 228 207

**Drs. Ocktoberrinsyah. M.A.g.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Puad Mawardi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan  
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Puad Mawardi  
NIM : 99363837  
Judul : Daulah Islamiyah ( Studi Komparasi Antara Pemikiran  
Hasan al-Banna dan Yusuf al-Qaradawi)

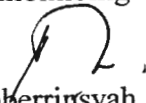
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana  
dalam jurusan Perbandingan Nazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi ini saudara tersebut di atas untuk segera  
dimunaqashahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Dzul Qaidah 1425 H  
3 Januari 2005 M

Pembimbing II

  
Drs. Ocktoberrinsyah. M. Ag  
NIP.150 2894 435

**PENGESAHAN**  
**SKRIPSI BERJUDUL**  
**Daulah Islamiyah ( Studi Komparasi Pemikiran Hasan**  
**al-Banna Dan Yusuf al-Qaradawi )**

Yang disusun oleh :

**Puad Mawardi**

**NIM : 99363837**


Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada tanggal 31 Januari 2005 M / 20 Zulhijah 1425 H yang dinyatakan diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 20 Zulhijah 1425 H  
31 Januari 2005 M



Panitia Munaqasyah

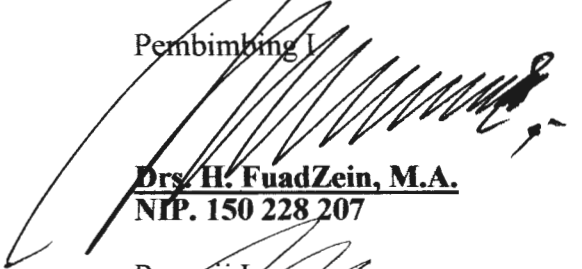
Ketua Sidang

  
**Drs. Supriatna**  
**NIP. 150 204357**

Sekretaris Sidang

  
**Ahmad Bahiey, SH, M.Hum**  
**NIP. 150 300639**

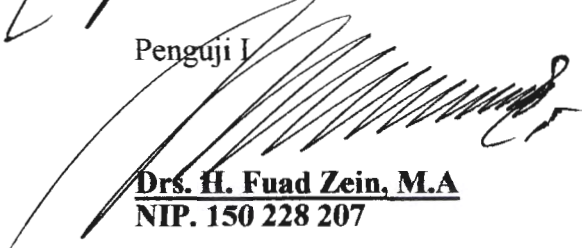
Pembimbing I

  
**Drs. H. Fuad Zein, M.A.**  
**NIP. 150 228 207**

Pembimbing II

  
**Drs. Oktoberrinsyah M.Ag**  
**NIP. 150 2894435**

Penguji I

  
**Drs. H. Fuad Zein, M.A**  
**NIP. 150 228 207**

Penguji II

  
**Drs. Susiknan Azhari, MA**  
**NIP. 150 266737**

## **PERSEMBAHAN**

### **Untuk Ayah dan Ibu**

#### **Adik, kakakku dan keluargaku**

Kakak-kakakku terkasih, adiku tersayang, dan semua keluarga terindah.

Luas Cintamu tak terbatas, besar kasihmu tak terukur, dan murni kasihmu tak ternilai.

Pengorbananmu, ketulusanmu dan do'a do'amu hadir di setiap nafasku. Hangatnya

Pelukanmu menjadikan kesejukan dalam kalbuku.

Maafkan aku jika belum mampu Meraih semua harapanmu.

Yakinlah semua harapanmu adalah harapanku dan telah Menyatu dalam nafasku.

Kepadamu skripsi ini dan salam sayang selalu dariku.

#### **Teruntuk Bungaku**

Waktu jualah sang guru mulia, Dia pemilik tema-tema indah bahkan terburuk-pun ia

ada. Wahai Bungaku sayang, mari sama-sama menghadap-Nya!

Tidak dan bukan kata kotor seperti jiwa ini

tak luput dari kenajisan

dengan kasih dan cintalah yang kupetik dari-Nya

Jiwaku besar, karena dirimu disisiku, karena engkau inembalut luka atas perintah-

Nya.

Langkahku-pun terarah, atas tuntunanmu, atas kasih-Nya Warna jiwa inipun indah,

karena hiasanmu, atas karunia-Nya Keindahan yang kumiliki saat bersamamu,atas

Qodrat-Nya.

( Puad )

Terima kasih atas teman-teman KMJ ( Keluarga Mahasiswa Jakarta ) yang telah memberikan motivasinya terhadap penyelesaian skripsi saya baik pada saat-saat ngopi bareng, makan bareng sampai “tidur bareng” di sekretariat sama teman-teman KMJ, mungkin ini yang selalu menjadi kenangan saya ketika balik kekampung halaman yaitu Jakarta tercinta, semoga kebersamaan yang terbentuk sebagai amal ibadah yang terilai.

Terima kasih atas teman-teman PMH-3/99 atas kerjasama yang dibangun, semoga kelak kita kan ditemukan kembali.

Sahabatku Muhammad el-Nasheeruddin al-Ma'muni, SHI. yang telah menemani dan mensupport penulis dalam penyusunan skripsi ini. Juga seluruh teman-teman PMH-3. angkatan Tahun 1999.

Sahabat dan temanku tercinta dibawah alam sadarku, terima kasih atas waktu, tenaga serta ilmu yang kalian berikan. Semoga Tuhan melimpahkan keberkahan dalam hidup ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri (Al-Hasyr: 19).*

*Ingatlah! hanya dengan mengingat Allah,  
hati merasa tenang (Ar-Ra'd: 28).*

(Al-Qur'an)

*Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya.*

*Perang yang paling besar adalah perang  
melawan diri sendiri.*

(Al-Hadis)

*Mengenali diri adalah jenis pengetahuan yang paling bermanfaat.*

*Saya heran mengapa orang yang kehilangan sesuatu  
akan berusaha mencarinya, sementara  
yang kehilangan dirinya,  
tidak.*

(Shahabat Ali r.a.)

*Ada realitas tunggal di seluruh dunia ini, yaitu pengetahuan  
tentang diri, siapa yang mampu menguasainya,  
akan mampu menguasai dunia.*

(Gandhi)

*Warna dunia kita, ditentukan oleh  
bagaimana kita mewarnai  
diri sendiri*

(Puad)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ:

Segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT., yang hanya karena rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul **“Daulah Islamiyah (Studi Komparasi Antara Pemikiran Hasan al-Banna dan Yusuf al-Qaradawi)”** Alhamdulillah telah selesai tersusun. Alasan utama pemilihan topik ini adalah karena masalah daulah Islamiyah sering difahami bukan dalam proporsi yang seharusnya oleh sebagian kalangan, sehingga sering timbul pengertian yang tidak tepat tentang konsepsi daulah Islamiyah. Selain itu, topik ini juga sangat berkaitan erat dengan perkembangan hukum politik yang beredar di tengah-tengah masyarakat, baik dalam konteks agama (normatif), sosial, dan budaya masyarakat, bahkan khususnya mengenai pertumbuhan dan pembaruan politik Islam di Indonesia. Oleh karena itu tema tentang daulah Islamiyah ini menuntut pembahasan yang lebih komprehensif lagi.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menyadari sepenuhnya bahwa walaupun sudah mengerahkan segala kemampuan, tetapi masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penyusun sangat berharap akan adanya masukan, baik berupa kritikan atau saran yang sifatnya membangun untuk dilakukan perbaikan.



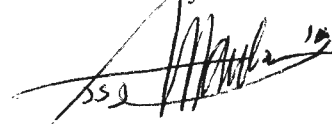
Dengan selesainya skripsi ini, penyusun hendak mengucapkan terima kasih yang dalam dan tulus kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Abdul Halim, M, Hum selaku pembimbing Akademik
3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA. dan Drs. Ocktoberriansyah, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah melakukan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau berdua penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
4. Kedua orang tua kakakku Bang Irfan dan Dewi, Irwan dan adikku Mansur dan Isterinya, Rahma, Sukma, Sofian dan juga seluruh keluarga yang telah memberikan semangat baik secara moril maupun materiil bagi penyusun.
5. Teruntuk keluarga Payakumbuh terima kasih, atas perhatian dan dukungannya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Demikianlah semoga jasa dan budi beliau-beliau merupakan amal saleh dan dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 21 Ramadan 1425 H  
06 Oktober 2004 M

Penyusun



**Puad Mawardi**  
NIM: 99363837

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	ba
ت	tā'	t	ta
ث	Sā	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	da
ذ	Zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	ra
ز	Zai	z	za
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan yc
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik
غ	ḡain	ḡ	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qā'	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yā'	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoflong dan rangkap atau diflong.

### 1. Vokal Tunggal

ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

#### D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

##### 1. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

##### 2. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - raudah al-Jannah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

##### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

##### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

البدیع - al-badī'u

### G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

أمرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzūna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين - Wa innailāha lahuwa khair ar-rāziqīn

I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl  
إنّ أزلّ بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

انصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMANJUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK.....	xx
<b>BABI : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM MENGENAI</b>	
<b>DAULAH ISLAMIYAH.....</b>	<b>25</b>
A. Pengertian.....	25
B. Teori dan Sejarah.....	27



C. Ciri-ciri.....	33
D. Bentuk Kekuasaan Khilafat.....	39
E. Dasar Perundang-undangan.....	47
<b>BAB III : SKETSA BIOGRAFI HASAN AL-BANNA DAN YUSUF</b>	
<b>AL-QARADAWI.....</b>	<b>51</b>
<b>A. Sketsa Beografi Hasan al-Banna.....</b>	<b>51</b>
1. Latar Belakang Sosial dan Pendidikan.....	51
2. Pengalaman dan Aktivitas Keilmuan.....	58
<b>B.Yusuf al-Qaradawi.....</b>	<b>72</b>
1. Latar Belakang Sosial dan Pendidikan .....	72
2. Pengalaman dan Aktivitas Keilmuan.....	77
<b>BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN POLITIK</b>	
<b>HASAN AL-BANNA DAN YUSUF AL-QARADAWI</b>	
<b>TENTANG DAULAH ISLAMIYAH.....</b>	<b>82</b>
A.Hasan Al Banna .....	82
1. Paradigma Pemikiran.....	82
2. Agama dan Negara.....	86
B. Yusuf al-Qaradawi.....	98
1. Paradigma Pemikiran.....	98
2. Agama dan Negara.....	100
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran-saran.....	112

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	113
-----------------------------	-----

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

LAMPIRAN I : TERJEMAHAN.....	I
LAMPIRAN II : BIOGRAFI ULAMA.....	II
LAMPIRAN III : BIODATA PENYUSUN.....	IV



**ABSTRAK**  
**DAULAH ISLAMIYAH**  
**(STUDI KOMPARASI ANTARA PEMIKIRAN**  
**HASAN AL-BANNA DAN YUSUF AL-QARADAWI**

Agama dan negara sebenarnya bukan suatu yang bertentangan secara dia-metral, atau juga bukan berarti negara bagian dari agama, melainkan negara itu inheren dalam agama. Kesadaran akan makna lebih jauh tentang politik yang inheren dalam agama merupakan kesadaran manusiawi yang tidak dapat dibantah, sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama. Implikasi dari kehidupan sosial ini akan membawa manusia dalam upaya mengembangkan sistem kehidupan bersama dengan perangkat hukumnya yang kemudian berkembang menjadi negara. Negara Islam (*daulah Islamiyah*) merupakan wacana yang tidak pernah pupus dibicarakan. Wacana ini akan senantiasa ada mengikuti perkembangan peradabar, dan pemikiran manusia seiring dengan kemajuan yang dialaminya. Negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupann sosial-politik manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan baik yang bersifat individual maupun sosial. Perkembangan wacana negara demokrasi telah dimulai sejak zaman Yunani kuno dengan ditandai berdirinya negara kota.

Kajian yang dikemukakan oleh Hasan al-Banna dan Yusuf al-Qaradawi mengenai *daulah Islamiyah* merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mengkaji dan *mendeskripsikan* lebih mendalam tentang kosnepsi keduanya mengenai *daulah Islamiyah*.

Pendekatan yang digunakan adalah *sosio-historis*, hal ini diperlukan guna mencari obyektifitas penelitian. Selain itu untuk menguji *relevansi* pemikiran keduanya, agar dapat diketahui secara tegas mengenai letak persamaan dan perbedaan antara keduanya, kemudian menggunakan metode komparasi (perbandingan) untuk menganalisisnya.

Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan. Bagi Hasan al-Banna bahwa pemerintahan Islam (*daulah Islamiyah*) adalah suatu pemerintahan yang mengacu bahkan harus siap untuk menjadikan syari'at Islam atau hukum Islam sebagai konstitusi negara dan penerapannya secara ketat (lebih menekankan pada formalitasnya). Sementara menurut Yusuf al-Qaradawi, *daulah Islamiyah* merupakan *daulah nasional* atau lokal ia tidak berdiri atas batasan-batasan tanah dan letak geografis. Karena pada dasarnya *daulah Islamiyah* adalah *daulah* yang terbuka bagi setiap muslimin, bebas tanpa ada paksaan dan tekanan dari manapun. Dengan demikian, bagi Yusuf al-Qaradawi *daulah Islamiyah* tidak harus diterapkan secara formil, tetapi lebih menekankan pada substansi yang terdapat dalam *daulah Islamiyah* itu sendiri, yang harus diterapkan atau dijalankan oleh setiap penguasa negara.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Islam (*daulah Islamiyah*) merupakan wacana yang tidak pernah pupus dibicarakan. Wacana ini akan senantiasa ada mengikuti perkembangan peradaban dan pemikiran manusia seiring dengan kemajuan yang dialaminya. Negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupann sosial-politik manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan baik yang bersifat individual maupun sosial. Perkembangan wacana negara demokrasi telah dimulai sejak zaman Yunani kuno dengan ditandai berdirinya negara kota. Negara berdasarkan bentuknya dalam teori politik secara garis besar dibedakan menjadi dua. *Pertama*, negara teokratis dan *kedua* negara sekuler. Negara teokratis merupakan perwujudan dari adanya kekuasaan Tuhan yang mewakili manusia. Sedangkan negara sekuler adalah negara yang sama sekali lepas dari ikatan keagamaan.

Setelah berakhirnya pemerintahan khalifah di Turki pada tahun 1924 dunia Islam mulai ramai membicarakan tentang konsep negara Islam, selama masa penjajahan Barat atas dunia Islam, kaum muslimin tidak sempat dan juga tidak mampu berpikir tentang ajaran agama mereka secara jelas, komprehensif dan tuntas mengenai berbagai masalah.

Untuk kurun waktu yang cukup lama, kaum muslimin secara sengaja dipisahkan dari ajaran-ajaran Islam oleh penjajah Barat dan dalam proses aliansi masyarakat Islam dari agamanya itu, kolonialisme dan imperialisme Barat itu melakukan "*westtoxication*" atau proses peracunan-Barat atas dunia Islam, setelah mengalami proses ini, sebagian masyarakat Islam kemudian dihinggapi penyakit yang oleh Abulhasan Banisadr disebut "*westomania*" penyakit kejiwaan yang menganggap Barat adalah segala-galanya.<sup>1</sup>

Bahwa secara intelektual kaum muslimin sangat lemah dan karena tidak mampu melakukan dialog yang seimbang dengan Barat. Impotensi intelektual ini secara langsung atau tidak langsung disebabkan juga oleh hubungan kekuasaan yang sangat senjang antara Barat dan dunia Islam. Kesenjangan dalam "*power-relationship*" tersebut mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan atau pertumbuhan intelektual masyarakat Islam. Pada gilirannya masyarakat Islam akhirnya menjadi konsumen-konsumen ideologi dari Barat dan tidak dapat melihat lagi perbendaharaan yang kaya-raya yang dimiliki oleh Islam itu sendiri.<sup>2</sup> Sesudah memperoleh kemerdekaan yang sebagian direbut dengan perjuangan bersenjata oleh masyarakat Islam, pada pasca-perang Dunia II, negara-negara muslim dapat

---

<sup>1</sup> M. Amien Rais, *Beberapa Pandangan tentang Negara Islam*, cet. II, (Bandung: Mizan, 1990), hlm.7

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.8

dikatakan telah menempuh dua tahap revolusi.<sup>3</sup> *Pertama* adalah revolusi nasional, yang mengantarkan bangsa-bangsa muslim ke pintu gerbang kemerdekaan. Revolusi tahap pertama merupakan pembebasan bangsa dari kelungan politik dan militer Barat. Pada tahap ini kaum muslimin seolah-olah terperanjat dengan peralihan dan suasana penjajahan ke suasana kemerdekaan. Banyak fenomena yang terjadi dalam negara muslim pasca revolusi ini yang berlanjut ke dalam revolusi tahap *kedua*, yaitu revolusi membangun kemerdekaan nasional masing-masing berdasarkan preskripsi-preskripsi Barat. Sebagian negara muslim mengambil-alih sosialisme sebagai ideologi dan sistem sosial mereka, sebagian lagi mencoba menerapkan kapitalisme (atau sebutlah demokrasi liberal). Ternyata revolusi tahap kedua tersebut—sebagian besar proses imitasi pelbagai ideologi Barat—tidak memberikan hasil positif, bahkan bisa dikata negatif dan destruktif terhadap cita-cita kemerdekaan dan pembangunan.

Dewasa ini kaum muslimin sedang memasuki revolusi tahap ketiga, yaitu revolusi mental dan intelektual, untuk menemukan kembali ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh. Tentu saja, di dalamnya termasuk ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bernegara. Revolusi Iran 1979, misalnya, merupakan contoh yang paling spektakuler dalam Dunia Islam dalam berusaha membebaskan diri dari kelungan dan dominasi Amerika Serikat sebagai eksponen Barat yang paling utama. Syah Iran, penguasa boneka Amerika, telah berusaha menekan bangsa Iran agar mengadopsi dan meniru Barat secara buta, sebagai otokrat, dospot, dan bahkan diktator yang loyal

---

<sup>3</sup> M. Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, cet. III, (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 37

pada kepentingan Amerika, Syah Iran telah menginjak-injak hak asasi bangsanya sendiri, mencoba melakukan deislamisasi dan menggantikannya dengan persianisasi, revolusi ini merupakan kebangkitan kesadaran bangsa Iran yang Muslim, dan mulainya upaya penemuan identitas dan warisan leluhur, yang tidak lain adalah ajaran Islam yang progresif dan revolusioner. Walaupun sekarang di sana-sini terjadi penyelewengan revolusi Iran akibat kekuasaan para mullah yang melampaui proporsi yang wajar—semoga dapat lenyap, sehingga revolusi Islam Iran yang orisinal, revolusi kemanusiaan yang berdasarkan pada ajaran Islam yang abadi, dapat kembali segar di panggung sejarah Islam.<sup>4</sup>

Ketiga tahap revolusi tersebut, telah dan akan dilalui oleh setiap negara muslim di dunia. Mereka akan mengalami pergulatan dalam menentukan masalah-masalah kenegaraan. Selama ini, teori negara dalam Islam bisa muncul dari tiga jurusan: *pertama*, bersumber dari teori khilafah yang dipraktekkan sesudah Rasulullah wafat, terutama dirujuk pada masa al-khulafa ar-Rasyidun. *Kedua*, bersumber dari teori imamah dalam paham Islam Syi'ah, dan *ketiga*, bersumber dari teori imarah atau pemerintahan.<sup>5</sup>

Berbicara tentang konsep negara Islam (*daulah Islamiyah*) di dunia umat Islam sendiri merupakan fenomena yang relatif belum terlalu lama.<sup>6</sup> Selama masa

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>5</sup> M. Dawam Rahardjo, "Ensiklopedia al-Qur'an: Ulil Amri", *Ulumul Qur'an*, No. 2/1993, hlm.26-34.

<sup>6</sup> M. Amien Rais, *Beberapa Pandangan...*, hlm. 11-12.

penjajahan, pembicaraan mengenai hal ini praktis tidak pernah terdengar karena adanya aliansi kaum muslimin dari ajaran-ajaran Islam yang hampir-hampir total. Kendati pun demikian, masyarakat Islam selalu melahirkan tokoh-tokoh intelektual dan ulama yang selalu membawa obor di tengah kegelapan intelektual umat. Mereka menunjukkan arah seharusnya yang mesti ditempuh oleh umat sesuai dengan ajaran Islam. Bahwa usaha mereka sebagian kandas di tengah jalan, kita telah mengetahui sebab-sebabnya. Di samping kesulitan mendidik massa umat untuk memahami ajaran agamanya secara benar dan tepat. Kondisi obyektif sejarah di masa penjajahan merupakan tembok besar yang menghalangi berhasilnya cita-cita para pemikir Islam.

Secara umum tujuan pokok pemerintahan Islam adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia dan mencegah segala bahaya, menegakkan keadilan dan melarang semua permusuhan antara manusia, tujuan pemerintahan Islam sama dengan tujuan yang hendak dicapai pemerintahan secara umum lainnya. Mengenai konsep negara, Islam nampaknya lebih cenderung berpendapat bahwa Islam tidak memerintahkan dan juga mengajarkan secara jelas mengenai sistem ketatanegaraan, tetapi mengakui terdapatnya sejumlah tata nilai dan etika dalam al-Qur'an. Islam menegakkan kekuasaan yang memiliki dua aspek: aspek keagamaan dan aspek keduniaan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Gaffar Aziz. *Berpolitik Untuk Agama: Missi Islam, Kristen, Dan Yahudi Tentang Politik*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 10



Dalam perkembangan selanjutnya, perbincangan mengenai daulah Islamiyah mulai memasuki kawasan kajian hukum, beberapa pemikir hukum Islam klasik mulai memperkenalkan istilah-istilah baru dalam teori politik (*Fiqh as-Siyasah*), mereka. Seperti *Khalifah*, *Ahl al-Hall wa al-Aqd*, *Bai'ah* dan beberapa istilah lain yang sejak semula tidak dikenal dalam istilah teologi Islam klasik, dalam kondisi yang tidak jauh berbeda, pada periode selanjutnya pemikir-pemikir politik Islam semakin intensif dikumandangkan oleh sejumlah aktivis kebangkitan Islam, baik di Timur Tengah maupun di wilayah Islam lainnya yang pada saat itu berada dalam cengkeraman penjajah Barat.

Meningkatnya intensitas tersebut secara umum dipengaruhi tiga hal, yaitu: *Pertama*, kerapuhan dunia Islam oleh faktor-faktor internal yang berakibat munculnya gerakan-gerakan pembaharuan dan pemurnian. *Kedua*, adanya rongrongan Barat terhadap keutuhan politik dan wilayah Islam. *Ketiga*, akibat keunggulan Barat dalam ilmu, teknologi, dan organisasi. Tiga hal tersebut sangat mewarnai orientasi umum para pemikir politik Islam kontemporer.<sup>8</sup>

Tentunya perbincangan mengenai wacana daulah Islamiyah juga tidak luput dari perhatian para tokoh politik Islam kontemporer. Misalnya, di antara tokoh-tokoh intelektual muslim dunia yang secara tegas mengkaji konsep daulah Islamiyah sebagai suatu referensi bagi sebuah sistem pemerintahan adalah Hasan al-Banna dan Yusuf al-Qaradawi.

---

<sup>8</sup> Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah, dan Pemikiran*, cet. V, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 115

Kaitannya dengan diskursus daulah Islamiyah, Hasan al-Banna menegaskan bahwa antara negara dan agama tidak dapat dipisahkan, karenanya perjuangan politik untuk menyebar dakwah merupakan suatu tugas dengan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Pemerintahan Islam tegak atas kaidah-kaidah yang sudah populer. Kaidah-kaidah itu merupakan kerangka pokok pemerintahan Islam kaidah-kaidah itu adalah tanggung jawab pemerintah, kesatuan masyarakat dan sikap saling menghargai aspirasi rakyat.<sup>9</sup> Kemudian al-Banna menguraikan bahwa pemerintahan Islam (daulah Islamiyah) adalah suatu pemerintahan yang mengacu bahkan harus siap untuk menjadikan syari'at Islam atau hukum Islam sebagai konstitusi negara dan penerapannya secara ketat. Karena Islam menurut al-Banna merupakan hukum sekaligus penerapannya atau aktualisasinya. Oleh karena itu sebuah pemerintahan yang tidak melaksanakan syari'at Islam adalah dosa besar dan pemerintahan itu boleh diambil alih untuk melaksanakan syari'at Islam<sup>10</sup>.

Sementara menurut Yusuf al-Qaradawi, daulah Islamiyah merupakan daulah nasional atau lokal ia tidak berdiri atas batasan-batasan tanah dan letak geografi. Pada dasarnya daulah Islamiyah adalah daulah yang terbuka bagi setiap muslimin, bebas tanpa ada paksaan dan tekanan, ia disebut sebagai daulah Internasional karena ia memiliki risalah yang mendunia, daulah yang berisi pemikiran dan akidah. Perbedaan etnik, wilayah, bahasa, warna kulit, melebur yang semua rakyatnya dipersatukan oleh

---

<sup>9</sup> Hasan al-Banna, *Risalah Pergerakan Islam Ikhwanul Muslimin*, alih bahasa Abdullah Salim, MA H. Asyhari Marzuqi (Surakarta: Era Inter Media, 1999), hlm. 298

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 248

iman kepada satu Allah, satu Rasul, satu kitab, satu kiblat, satu syiar, satu syari'ah, satu adab, sehingga mereka menjadi satu umat yang satu, berdiri di atas keesaan kalimat yang memancar dari kalimat tauhid.

Kemudian Yusuf al-Qaradawi menambahkan, meskipun nash syari'ah tidak pernah mewajibkan didirikannya suatu sistem politik atau kenegaraan tertentu akan tetapi tabi'at risalah Islam sendiri mengharuskan adanya kekuasaan dan wilayah agar syari'ah Islam itu bisa diterapkan di dalamnya,<sup>11</sup> karena tabiat Islam bersifat universal dan umum sehingga mampu menyusup keseluruhan sisi kehidupan. Islam telah menetapkan hukum bagi masyarakat, mengontrol perilaku manusia sesuai dengan perintah Allah SWT, oleh karena itu fiqh Islam tidak hanya mencakup hubungan individu dan negara dan pemerintahan atau hubungan pemimpin dengan rakyat, hubungan hakim dengan terdakwa hubungan kekuasaan dengan masyarakat (yang diatur dalam istilah modern sistem ketatanegaraan), pemerintahan, keuangan dan hubungan internasional, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan politik, fiqh inilah yang disebut dengan *as-siyasah asy-Syar'iyah*.<sup>12</sup> Dengan kata lain, Islam merupakan sistem yang sempurna bagi kehidupan, yang meletakkan prinsip-prinsip, memancang kaidah, membuat ketetapan-ketetapan hukum, menjelaskan tuntunan, yang berkaitan dengan kehidupan individu, cara menata rumah tangga, mengatur masyarakat, mendirikan daulah dan menjalin hubungan dengan seluruh dunia.

---

<sup>11</sup> Yusuf al-Qardawi, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, alih bahasa Kathur Suhardi (Jakarta: al-Kautsar, 1999), hlm. 38

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 23

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun perlu membatasi rumusan pokok masalah yang akan diteliti agar terfokus dan tidak meluas, sehingga menjadi jelas. Adapun pokok masalahnya sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemikiran Hasan al-Banna dan Yusuf al-Qaradawi mengenai daulah Islamiyah?
- b. Bagaimana relevansi pemikiran keduanya dalam konteks politik Islam ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
  - a. Untuk menggambarkan atau mengungkapkan bagaimana pemikiran Hasan al-Banna dan Yusuf al-Qaradawi mengenai daulah Islamiyah
  - b. Menjelaskan bagaimana Relevansi pemikiran Hasan al-Banna dan Yusuf al-Qaradawi dalam konteks politik Islam dengan melihat sisi persamaan dan perbedaan.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
  - a. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu memberikan kontribusi pemikiran, khususnya mengenai persoalan politik yang semakin hari mengalami perkembangan. Di samping memberikan pandangan baru akan politik yang didasarkan pada konsep keagamaan dan sosio-kultural yang berbeda.

- b. Bagi pengembangan politik Islam, yaitu memperkaya khazanah pemikiran Islam, khususnya dibidang kajian siyasah, yang membicarakan tentang daulah Islamiyah.
- c. Bagi kehidupan secara umum, yaitu memberikan kontribusi pemikiran tentang daulah Islamiyah sebagai bahan perbandingan dengan karya-karya penelitian yang lain.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk mendukung penelaah yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Karya-karya tersebut di antaranya adalah

Buku yang mengkaji sangat detail tentang negara Islam “daulah Islamiyah” adalah *Cakrawala Islam: antara Cita dan Fakta*,<sup>13</sup> karya Amien Rais. Buku ini merupakan kumpulan tulisan, yang mengupas banyak dan panjang lebar tentang politik Islam yang telah menentukan format baru yang mencakup landasan teologi, tujuan dan pendekatan Islam politik yang di pandang sebagai bangunan dengan konstruk negara Islam

---

<sup>13</sup> M. Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, cet. III, (Bandung: Mizan, 1991)

Buku *Zaman Baru Islam di Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Nurcholish Madjid, dan Jalaluddin Rahmat*,<sup>13</sup> yang disusun oleh Dedy Djamiluddin Malik dan Idi Subandi Ibrahim. Buku ini membahas secara panjang lebar tentang pemikiran keempat tokoh tersebut, tentang Islam dan negara, namun karena banyaknya pemikiran tokoh yang dikaji, maka buku itu relatif kurang bisa menggali substansi pemikiran tokoh yang ada dan korelasi-korelasi yang signifikan di antara pemikiran-pemikiran tokoh yang ada.

Skripsi karya Abdul Amin yang judulnya, *Negara Islam studi komparatif atas Pemikiran Abu A'la Maududi dan Nurchalis Madjid*, di dalamnya disinggung masalah tentang ruang lingkup negara Islam yang legal-formal secara detail

Kemudian Skripsi Lalu Rizqan Jaya dengan judul, *Masyarakat muslim dalam Konteks Politik Islam Kontemporer: Studi Pemikiran Fazlur Rahman dan Hasan al Banna*. Skripsi ini hanya menekankan pada aspek formalistik–legalistik dari Islam dalam konteks negara bangsa dewasa ini.

Penelitian ini akan menelusuri pemikiran Hasan al-Banna dan Yusuf al-Qaradawi yang tentunya berbeda dengan penelitian dan buku-buku yang tersebut di atas, sebab pada penelitian ini penyusun lebih mengfokuskan pada kajian

---

<sup>13</sup> Dedy Djamiluddin Malik dan Idi Subandi Ibrahim, *Zaman Baru Islam: Pemikiran Dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Nurcholish Madjid, dan Jalaluddin Rahmat*, cet. I, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), hlm. 35

paradigma<sup>14</sup> dan visi pemikiran keduanya mengenai daulah Islamiyah dalam kapasitas keduanya sebagai representasi intelektual muslim modern.

### E. Kerangka Teoretik

Dalam pengalaman Islam, kajian tentang hubungan Islam dan politik sebenarnya memunculkan beberapa klaim. Diantaranya, muncul klaim yang menyatakan tidak ada pemisahan antara agama dan politik, sebagaimana yang dianut oleh pemikir-pemikir Islam formalistik seperti Sayid Quthub dan al-Maududi. Sementara itu pemikir Islam seperti M. Iqbal, menganut pemisahan antara agama dan politik, bukan dalam arti ide, melainkan dalam pemisahan fungsi.<sup>15</sup>

Agama dan negara sebenarnya bukan suatu yang bertentangan secara diametral, atau juga bukan berarti negara bagian dari agama, melainkan negara itu inheren dalam agama. Kesadaran akan makna lebih jauh tentang politik yang inheren dalam agama merupakan kesadaran manusiawi yang tidak dapat dibantah, sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama. Implikasi dari kehidupan sosial ini akan membawa manusia dalam upaya mengembangkan sistem kehidupan bersama dengan perangkat hukumnya yang kemudian berkembang menjadi negara.

---

<sup>14</sup> Yang dimaksudkan paradigma disini adalah pandangan hidup yang dimiliki oleh para ilmuwan dalam suatu disiplin ilmu tertentu. M. Munandar Sulaiman, *Dinamika Masyarakat Transisi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 19.

<sup>15</sup> Zainuddin Maliki, *Agama Rakyat Agama Penguasa: Konstruksi Tentang Realitas Agama dan Demokrasi* (Yogyakarta: Yayasan Galang, 2000), hlm. 9.

Dalam Islam prinsip dasar tentang pengaturan kehidupan publik yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan atau kesejahteraan manusia secara umum, tujuan substantif-universal disyariatkannya hukum agama dalam untuk menciptakan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka. Sedangkan Abd. Wahhab Khallaf,<sup>16</sup> merumuskan kemaslahatan publik yang dapat dijadikan referensi untuk pengambilan hukum aktual, yang meliputi; 1. Masalahah itu bersifat esensial, yaitu kepentingan yang secara praktis-operasional mampu mewujudkan kesejahteraan umum yang mencegah terjadinya kerusakan. 2. Masalahah itu ditinjau untuk kepentingan rakyat banyak, bukan individu. 3. Masalahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan atau dalil-dalil umum nash. Kemaslahatan itu utamanya ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan yang meliputi:

- a. Hak memelihara agama dan kebebasan beragama (*hifz ad-Din*).
- b. Hak memelihara jiwa dan keselamatan fisik (*hifz an-Nafs*).
- c.. Hak memelihara keturunan (*hifz an-Nasl*).
- d. Hak memelihara harta benda atau hak milik pribadi (*hifz al-Mal*).
- e. Hak memelihara akal atau kebebasan berfikir (*hifz al-'Aql*).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Hilmy cet. II, (Bandung: Gema Rsalah Press, 1997), hlm. 146. dan 354-355

<sup>17</sup> Fathur Rahman, Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. III, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 123-130.



Kemaslahatan hubungannya dengan konteks geografis, sosial, politik dan kebudayaan aktual akan mempunyai nuansa perbedaan yang mendasar mengenai tafsir, cakupan, bahasa dan idiom-idiom struktural, meskipun pada esensinya memiliki makna yang sama dan universal. Oleh karenanya, untuk mewujudkan kemaslahatan pada level politik dan diskursus fiqh Islam maka dikenal terminologi *as-Siyasah asy-Syar'iyah*, yaitu sebuah teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan publik, maka seorang penguasa harus dapat mengambil atau memutuskan suatu kebijakan guna menegakkan kemaslahatan itu.<sup>18</sup> Sehingga *as-Siyasah asy-Syar'iyah* di sini mempunyai empat komponen unsur pokok: 1. Adanya kebijakan hukum atau aturan pokok. 2. Dibuat oleh seorang penguasa. 3. Diwujudkan guna kemaslahatan secara umum. Dan 4. Tidak bertentangan dengan prinsip nilai-nilai Islam.<sup>19</sup>

Abdurrahman Wahid berpendapat, bahwa pada prinsipnya dalam Islam, “negara itu adalah hukum (al-Hukmu), dan sama sekali tidak memiliki bentuk negara”, yang terpenting bagi Islam, tambah Abdurrahman Wahid, adalah etika kemasyarakatan dan komunitas.<sup>20</sup> Dengan demikian jelaslah, bahwa bagi umat Islam yang terpenting adalah pengaturannya (al-hukmu). Sebab konsep dasar Islam tentang

---

<sup>18</sup> Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 36.

<sup>19</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. IkhtiarBaru, t.t), V:1626-1627.

<sup>20</sup> Dedy Djamaluddin, *Zaman Baru Islam*, hlm. 169. Atau M. Syafii'I Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm.188.

masyarakat adalah *al-hukmu* bukan *al-daulah* (negara). Dalam al-Qur'an, kata-kata *al-daulah* (edaran atau struktur) itu tidak ada. Jadi istilah kenegaraan dalam al-Qur'an tidak memakai *al-daulah*. Pengertian kenegaraan dalam arti istilah geografis menggunakan istilah *balдах*.<sup>21</sup> Untuk menguatkan pendapatnya, Abdurrahman Wahid membeberkan lintasan sejarah pemerintahan Islam awal yang disebutnya sebagai sebuah Dinasti, menurutnya:

Nabi Muhammad ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi kepala negara dan pemimpin umat atau komunitas melalui wahyu. Kemudian Nabi tidak merumuskan apa-apa lagi. Sehingga terjadilah konflik untuk menyelesaikan masalah kepemimpinan yang telah terjadi, dan akhirnya Abu Bakar dibai'at menjadi pemimpin. Tatkalah Abu Bakar sakit dan hendak wafat, beliau menitipkan pesan agar Umar Ibnu al-Khatthab untuk menggantikan kepemimpinannya. Kemudian ketika Umar R.A. akan wafat, beliau juga berpesan agar menunjuk tuju orang dewan pemilih termasuk Abdullah, anak beliau. Namun dengan catatan Abdullah tidak boleh dipilih, akhirnya yang menjadi pemimpin adalah Utsman bin Affan, yang akhirnya ia dibunuh dan tidak jelas pesannya. Begitulah nasib para penggantinya. Dari proses tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada masa awal Islam yang ada hanya Dinasti. Lalu bentuk negara awal Islam itu yang bagaimana? Ungkap Gus Dur, karena bentuk Dinasti, maka institusionalisasi (kelembagaan) politiknya cenderung mempertahankan status Quo.<sup>22</sup>

Maka pada akhirnya Abdurrahman Wahid mengungkapkan—bahwa Islam sebenarnya tidak memiliki konsep pemerintahan yang definitif. Buktinya dalam suatu sistem pemerintahan yang paling pokok (sebagaimana tercantum dari pernyataan di atas) adalah persoalan *suksesi* kekuasaan (pergantian kepemimpinan), ternyata Islam

---

<sup>21</sup> Abdurrahman Wahid, Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), hlm. 55-56. Atau Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Diadilii Kiyai-kiyai*, cet. I, (Surabaya: Jawa pos Press, 1989), hlm. 54.

<sup>22</sup> Abdurrahman Wahid, *Tabayun Gus Dur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, dan Reformasi Kultura*, I (Yogyakarta: LKiS, 1998), hlm. 235.

tidak mempunyai pola yang tetap. Kadang memakai konsep *istikhlaf* (kasus abu Bakar ke Umar), kadang memakai sistem *bai'at* (umat membai'at Abu Bakar), dan kadang juga memakai sistem *ahlu al-hall wa al-aqdi* (sistem formatur). Padahal perihal *sukseksi* adalah persoalan yang cukup urgen dalam masalah kenegaraan. Tiga model sistem tersebut ini terjadi dalam tempo tiga belas tahun, padahal kalau memang Islam memiliki konsepnya, tentu tidak akan terjadi demikian, apalagi para sahabat adalah orang yang patuh, taat, dan takut dengan Rasulullah.<sup>23</sup>

Dengan demikian, Islam memang tidak mengatur konsep kenegaraan, yang ada hanyalah “komunitas agama” (*kuntum khaira ummatin ukhrijat li an-nas*). Jadi *khaira ummatin*, bukan *khaira daulatin* atau *khaira jumhuriyyatin*, apalagi *khaira mamlakatin*.<sup>24</sup>— Sehingga yang terpenting baginya adalah berlakunya hukum Islam di Tengah-tengah masyarakat.<sup>25</sup>

Kemudian Abdurrahman Wahid menambahkan, Islam berfungsi penuh dalam kehidupan sebuah masyarakat bangsa melalui perkembangan nilai-nilai dasarnya sebagai etika masyarakat yang bersangkutan. Islam berfungsi sebagai bagian kehidupan sosial yang akan memandu jalannya kehidupan bernegara dan bermasyarakat tersebut sesuai dengan martabat luhur dan kemuliaan derajat manusia. Karena pada analisis terakhir manusialah yang menjadi obyek upaya kesejahteraan

---

<sup>23</sup> Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Diadili*, hlm. 55.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan*, hlm. 87.

hidup tersebut, bukan bentuk negara yang dipakai, dan bukan bentuk kemasyarakatan yang lain, hal ini semata-mata karena ia lebih efektif untuk tercapainya tujuan tersebut.<sup>26</sup>

Sedangkan Amien Rais menegaskan, bahwa *Islamic state* atau negara Islam (daulah Islamiyah) merupakan istilah yang tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, karena itu, menurutnya tidak ada perintah dalam Islam untuk mendirikan negara Islam. Yang lebih penting adalah selama suatu negara telah menjalankan *etos Islam*, kemudian menjalankan keadilan sosial dan menciptakan suatu masyarakat yang egaliter,<sup>27</sup> serta jauh dari eksploitasi manusia atas manusia maupun eksploitasi golongan "ras, suku, dan agama" atas golongan lain, berarti telah mendirikan suatu negara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, ungkap Amien Rais. Baginya apalah artinya suatu negara yang mengagumkan Islam sebagai dasar negara, kalau hanya formalitas kosong. Amien mencotohkan negara Arab Saudi yang tidak mempunyai konstitusi, dan baginya, itu merupakan keanehan yang terjadi dalam zaman yang modern ini.<sup>28</sup>

Menurut Amien Rais, bahwa kedua sumber hukum Islam—al-Qur'an dan as-Sunnah—telah memberikan skema kehidupan (*the scheme of life*) yang sangat jelas

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

<sup>27</sup> Khalid Novianto, *Era baru Indonesia: Sosialisasi Pemikiran Amien Rais, Hamzah Haz, Matori Abdul Jalil, Nur Mahmudi, dan Yusril Ihza Mahendra*, cet.1 (Jakarta: Raja grafindo, 1999), hlm. 23.

<sup>28</sup> M.Amien Rais, "Tidak ada Negara Islam", dalam Agus Edisantoso (peny.), *Tidak Ada Negara Islam: Surat-surat Politik Nurcholis Madjid-Muhamad Roem*, (Jakarta: Djambatan, 1997), hlm. XXII-XXIII

dan sempurna. Dan skema yang telah memberikan etik secara jelas bagi pengelolaan seluruh kehidupan manusia itu adalah “syari’ah” Dalam pandangannya, syari’ah adalah sistem hukum yang lengkap dan terpadu. Agar syari’ah dapat dilaksanakan, sudah pasti membutuhkan kekuasaan politik, dan yang memiliki kekuatan untuk melaksanakan hukum itu adalah negara. Menurut Amien, dalam pandangan Islam, negara adalah penjaga syari’ah.<sup>29</sup>

Lebih lanjut Amien Rais memaparkan, dalam membangun sebuah negara sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka yang diperlukan adalah;<sup>30</sup> *Pertama*, negara dan masyarakat harus ditegakkan atas dasar musyawarah. *Kedua*, ditegakkan di atas keadilan. Bagi Amien Rais, keadilan merupakan nilai terpenting dalam hukum Islam. Al-Qur’an dan al-Sunnah memberikan isyarat sangat tegas bahwa keadilan adalah suatu konsep yang utuh. Keadilan bukan hanya menyangkut hukum, tapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan dan lain sebagainya. Menegakkan hukum saja—dengan mengabaikan keadilan sosial, ekonomi, dan keadilan pendidikan—akan melahirkan ketimpangan dalam masyarakat, dan demikian pula sebaliknya.<sup>31</sup>

*Ketiga*, kebebasan atau kemerdekaan, ini merupakan nilai yang juga amat diperhatikan oleh *syari’ah*. Menurut Amien Rais, akar dari pelbagai kebebasan

---

<sup>29</sup> M. Amien Rais, *Cakrawala Islam*, hlm. 53. Atau Kholid Novianto, *Era Baru Indonesia*, hlm. 23.

<sup>30</sup> M. Amien Rais, *Cakrawala Islam*, hlm. 55-57.

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 61

tersebut adalah kebebasan berfikir, dan Islam menganggap kebebasan berfikir ini sebagai hak mutlak manusia. Hak untuk memilih (*freedom of choice, right of choice*), diberikan secara sempurna oleh Islam. Kasus pelanggaran yang telah dilakukan Adam, nenek-moyang manusia, barangkali merupakan simbol adanya kebebasan untuk memilih. Bahkan, hak untuk menjadi atheis pun dijamin oleh *syari'ah*, selama seorang atheis tidak mengganggu ketertiban umum.<sup>32</sup>

*Kempat*, ditegaskan di atas persamaan Menurut Amien Rais, manusia harus berdiri sama di depan hukum (*equality before the law*), tanpa diskriminasi berdasarkan ras, asal-usul, bahasa, keyakinan, pangkat, atau latar belakang sosial-ekonomi. Namun perlu diingat bahwa persamaan di sini adalah dalam arti legal, bukan faktual. Mengapa? Karena persamaan faktual akan meniadakan sama sekali perbedaan-perbedaan yang wajar dalam masyarakat, dan dapat menjurus pada kredo komunis, yaitu “dari masing-masing orang diminta sesuai dengan kemampuannya, kepada masing-masing diberikan sesuai dengan kebutuhannya.” (*freedom each according to his ability, to each according to his need*).<sup>33</sup>

*Kelima* pertanggungjawaban penguasa dihadapan rakyat. Prinsip pertanggungjawaban ini termasuk prinsip penting dalam wawasan *syari'ah*. Banyak hadis yang mengajarkan bahwa penguasa yang ternyata tidak memiliki kualifikasi—baik karena tingkah-lakunya yang imoral, opresif, maupun melanggar al-Qur'an dan al-Sunnah—tidak perlu ditaati lagi, dan harus diturunkan. Dalam pandangan Islam,

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

penentuan pertanggungjawaban (*impeachment procedure*) sepenuhnya dibenarkan terhadap penguasa yang gagal memenuhi kewajibannya. Menurut Amien Rais, kelima nilai politik atau prinsip konstitusional di atas harus ditegakkan dalam membangun suatu negara yang Islami (negara yang dicita-citakan Islam).<sup>33</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan sifat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini digunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Penelitian ini juga termasuk dalam katagori historis-faktual, sebab yang menjadi obyek penelitiannya adalah pemikiran seorang tokoh,<sup>34</sup> dalam hal ini adalah Hasan al-Banna dan Yusuf al-Qaradawi. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik-komparatif.<sup>35</sup>

### 2. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya, pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan *me-recover*

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 75

<sup>34</sup> Anton Baker, *Metode-metode Filsafat*, cet. I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 136. Atau Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1995), hlm. 42

<sup>35</sup> Penelitian ini berusaha memaparkan tentang daulah Islamiyah secara umum sebelum akhirnya akan mendeskripsikan kerangka pemikiran kedua tokoh yang diteliti yaitu Hasan al-Banna dan Yusuf al-Qaradawi melalui data yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis interpretasi tentang bagaimana corak pemikiran yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut dengan membangun korelasi yang dianggap signifikan. Kemudian menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa muncul karakteristik pemikiran serta persamaan dan perbedaan kedua tokoh ini.

buku-buku atau tulisan-tulisan yang disusun oleh Hasan al-Banna adalah *Majmua'ah Rasa'il asy-Syahid Hasan al-Banna diterjemahkan menjadi Risalah Pergerakan al-Ikhwan al-Muslimun* adapun Yusuf al-Qardawi, adalah *Min Fiqhid Daulah Fil-Islam diterjemahkan menjadi Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an dan as-Sunah*. serta buku-buku lain yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis penelitian.

### 3. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis induktif-interpretatif. Induktif metode penelitian yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum seputar politik Islam ( siyasah syar'iyah ), digunakan untuk menilai kejadian khusus dari pemikiran Hasan al-Banna dan Yusuf al-Qaradawi mengenai daulah islamiyah Sedangkan interpretative artinya menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi yang tidak subyektif untuk mencapai kebenaran yang obyektif.<sup>36</sup> yang berguna untuk mengetahui ragam pemikiran masing-masing.

### 4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data dalam skripsi ini adalah metode pendekatan sosio-historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latarbelakang sosio-kultural sosio-politik seorang tokoh,

---

<sup>36</sup> Anton Bakker dan Achmad Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. I, ( Yogyakarta: Kanisiua, 1990 ), hlm. 51.



karena pemikirannya seorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya.

Historis, adalah pendekatan yang mengkaji sebuah peristiwa atau suatu pemikiran yang diletakkan dalam background sejarahnya dan realitas yang melingkupinya, sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh faktor tersebut terhadap karakteristik pemikiran keduanya dalam dikursus daulah Islamiyah.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam penelitian ini dan supaya bisa dipahami secara runtut dan sistematis, maka kerangka penulisannya tersistematika sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan. Telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. Kerangka teoretik menyangkut pola fikir atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. Metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematiskan penyusunan skripsi.

Bab kedua, mengulas tentang gambaran umum tentang daulah Islamiyah. Hal ini diperlukan untuk memberikan gambaran tentang konsep dan sistem daulah Islamiyah saat ini. Bab ini terbagi atas lima sub. Pertama, membahas teori dan sejarah daulah Islamiyah. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kapan daulah Islamiyah itu ada. Kedua, menilik pengertian daulah Islamiyah. Ketiga, membahas mengenai cirri-ciri daulah Islamiyah. Keempat, menjelaskan betapa pentingnya dasar-dasar perundang-undangan dalam daulah Islamiyah dan. Kelima, mengupas bentuk kekuasaan khilafah yang ada dalam daulah Islamiyah. Pemaparan ini perlu untuk memahami akibat hukum yang timbul dari terbentuknya daulah Islamiyah dalam konteks dunia modern sekarang ini.

Bab ketiga, tentang sketsa biografi Hasan al-Banna dan Yusuf Qaradawi mengenai Daulah Islamiyah, ditinjau dari segi latar belakan sosial dan pendidikan keduanya, kemudian dilanjutkan tentang pengalaman dan aktivitas keilmuan Hasan al-Banna dan Yusuf Qaradawi.

Selanjutnya bab keempat, memuat pendapat Hasan al-Banna dan Yusuf al-Qaradawi yang berkenaan dengan segi-segi persamaan dan perbedaan antara keduanya tentang daulah Islamiyah dalam kerangka perbandingan (*komparatif*). Sehingga dari ulasan ini diharapkan akan ada kejelasan bagaimana keduanya memandang mengenai daulah Islamiyah.

Bab kelima, sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan sehingga memperjelas jawaban terhadap persolan yang

dikaji serta saran-saran dari berkenaan dengan pengembangan keilmuan agar dapat mencapai hal-hal yang lebih baik dan lebih maju.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

1. Kaitannya dengan daulah Islamiyah, Hasan al-Banna menegaskan bahwa antara negara dan agama tidak dapat dipisahkan, karenanya perjuangan politik untuk menyebar dakwah merupakan suatu tugas dengan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Pemerintahan Islam tegak atas dasar kaidah-kaidah yang sudah populer. Kaidah-kaidah itu merupakan kerangka pokok pemerintahan Islam yang meliputi tanggung jawab pemerintah, kesatuan masyarakat dan sikap saling menghargai aspirasi rakyat. Kemudian al-Banna menguraikan bahwa pemerintahan Islam (daulah Islamiyah ) adalah suatu pemerintahan yang mengacu bahkan harus siap menjadikan syari'at Islam atau hukum Islam sebagai konstitusi negara dan penerapannya secara ketat. Karena Islam menurut al-Banna merupakan hukum, sekaligus penerapannya atau aktualisasinya. Oleh karena itu sebuah pemerintahan yang tidak melaksanakan syari'at Islam adalah dosa besar dan pemerintah itu boleh di ambil alih untuk melaksanakan syari'at Islam.

Sementara menurut al-Qaradawi, menegaskan bahwa meskipun nas syari'at tidak pernah mewajibkan didirikannya suatu sistem politik atau kenegaraan tertentu akan tetapi tabi'at risalah Islam sendiri mengharuskan adanya kekuasaan dan wilayah agar syari'at Islam itu bisa diterapkan di

dalamnya, karena tabi'at Islam bersifat universal dan umum sehingga mampu menyusup keseluruhan sisi kehidupan. Islam telah menetapkan hukum bagi masyarakat, mengontrol perilaku manusia sesuai dengan perintah Allah SWT.

2. Hasan al-Banna dan Yusuf al-Qaradawi keduanya mempunyai pemikiran dan cita-cita yang sama yaitu menghidupkan kembali “Daulah Islamiyah” Dalam memandang Daulah Islamiyah, Hasan al-Banna mewakili pemikiran yang berhaluan *formalis*. Bagi al-Banna yang notebennya adalah seorang *formalis* lebih menitikberatkan pada bentuk dan simbol, sehingga disini al-Banna lebih menekankan pada bentuk dan dimbol Islam dalam suatu daulah (negara), oleh karenanya negara yang islami dalam pandangan Hasan al-Banna adalah negara yang secara ideologi dan *legal-formalis* menggunakan Islam satu-satunya asas. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya syari'at Islam dan menjadikan hukum Islam sebagai hukum dan satu-satunya konstitusi negara yang paling dominan. Sedangkan Yusuf al-Qaradawi lebih dipandang sebagai pemikir yang berhaluan pada faham *subtansialik*, menegaskan bahwa kaitannya dengan “Daulah Islamiyah” ia lebih menitikberatkan pada perberlakuan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Islam dapat diterpkan. Dengan tidak menyinggung bentuk suatu negara ataupun simbol Islam yang terpenting negara sudah menjalankan roda pemerintahan itu sesuai dengan ajaran-ajaran syari'at, berarti negara tersebut sudah termasuk daulah Islamiyah (negara yang menegakkan sendi-sendi Islam ).

## B. Saran-saran

1. Untuk para cendekiawan terutama kalangan muda untuk pro aktif dan serius menggali pemikiran-pemikiran tokoh Islam, agar dapat memperkaya hazanah pemikiran dengan tidak membatasi disiplin ilmu, tokoh dan kelompoknya, sehingga tidak membuka ruang konflik yang membodohkan. Tetapi lebih mengembangkan sikap mengklaim diri paling benar dapat dihindarkan.
2. Dengan pendekatan moral-etik al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai landasan perjuangan politik sebenarnya umat Islam tidak harus secara kaku untuk menjadikan tradisi yang saklek dalam rangka membangun cita-cita Islam yang mengajarkan cita-cita luhur kemanusiaan universal. Oleh karena itu, kajian tentang politik Islam harus digiatkan lagi. Sebab selama ini literatur yang berkaitan dengan kajian politik Islam kontemporer yang menjadi kaidah politik umat Islam yang *genuine* di Zaman modern ini masih sangat minim.
3. Mengurangi ketegangan-atau bahkan konflik dari dua model pemikiran di atas dalam tataran praktisnya adalah usaha-usaha yang harus terus diupayakan. Termasuk di antaranya dengan memberikan ruang atau kesempatan terhadap wacana bebas *atau free discourse* bagi penyelesaian masalah kenegaraan dan kebangsaan dalam rangka menciptakan kemakmuran bagi rakyat yang menjadi cita-cita bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir.

- Departemen Agama R.I, Al-Qur'an dan terjemahan, Surya Cipta Aksara, 1993
- Raharjo, Dawan M. "Ensiklopedia al-Qur'an: Ulil Amri", *Ulumul Qur'an*, No. 2/1993
- Rahman, Fazlur. *Tema Pokok al-Qur'an*, alih bahasa Anas Mahyuddin, Bandung, Pustaka, 1996.

### B. Kelompok Fiqh.

- Djamil, Rahman, Fathur, *Filsafat Hukum Islam*, cet. III, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Al-Jabiri, Abid, *Agama, Negara, dan Penerapan Syari'ah*, alih bahasa Mujiburrahman, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001.
- Khalaf, Wahab, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Hilmy, cet. II, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Madjid, Nurcholish. *Kontekstualisasi Doktrin Islam*, cet. II, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Maliki, Zainuddin, *Agama Rakyat Agama Penguasa: Konstruksi Tentang Realitas Agama dan Demokrasi*, Yogyakarta: Yayasan Galang, 2000.
- Al-Mawardi *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah, ajaran sejarah dan pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Press, 1999.
- Al-Qaradawi Yusuf, *Fiqh Ikhtilaf: Antara Perbedaan yang Diperbolehkan dan Perpecahan yang Dilarang*, alih bahasa: Ainur Rafiq, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Negara, Ijtihad Baru seputar Sistem Demokrasi, Multipartai, Keterlibatan wanita Di dewan Perwakilan Partisipasi Dalam*

*Pemerintahan Sekuler*, terjemahan: Syafril Halim, cet. I, Jakarta: Rabbani Press, 1997.

\_\_\_\_\_, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, alih bahasa, Kathur Suhardi, Jakarta: al-Kautsar, 1999.

\_\_\_\_\_, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an dan as-Sunah*, terjemah; Kathur Suhardi cet. I, Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 1997.

Ar-Rais, Dhiya' ad-Din. *Islam Dan Khalifah: Kritik Terhadap Buku Khilafah Dan Pemerintahan Dalam Islam*, Ali 'Abdur Raziq, terjemahan, Afif Muhammad, cet. I, Bandung: Pustaka, 1985.

Rachman, Munawar Budhy, *Kontekstualitas Doktrin Islam Dalam Sejarah*, cet. I, Jakarta: Paramadina, 1994.

Shihab, Quraish, M, *Tafsir Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992.

Taimiyah, Ibn, *Siyasah Syari'iyah: Etika Politik Islam*, terjemahan: Rafiq Munawar, cet. I, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Talimah, Isam, *Manhaj Fiqh Yusuf al-Qaradawi*, alih bahasa: Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

### **C. Kelompok Lain.**

Anwar, Syafi'i M, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1995.

Ashari, Tohir Rahmat, *Konsep Pergerakan Al-Ikhwanuul Muslimun: Upaya Mengenal Hasan al-Banna Lebih Dekat, dalam Islam Garda Depan; Mozaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, M. Aunul Abid Shah, cet. I, Bandung: Mizan, 2000.

Aziz Gaffar, *Berpolitik Untuk Agama: Missi Islam, Kristen, Dan Yahudi Tentang Politik*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

\_\_\_\_\_, *Islam Politik Pro dan Kontra*, terjemahan M. Thoha Anwar, cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.



- Al-Banna, Hasan, *Risalah Pergerakan Islam Ikhwanul Muslimin*, terjemah, Anis Matta, Surakarta: Era Inter Media, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Memoara al-Banna Untuk Dakwah dan Para Dai'nya*, terjemah, Salafuddin Abu Sayyid & Hawin Murtadha, cet. II, Solo: Era Intermedia, 1999.
- Baker, Anton, *Metode-metode Filsafat*, cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Borgatta, Edgar. *Encyclopedia of sociology*, New York: Mam Millan Publishing Company, 1999.
- Chandra, Vira Sri. "Revolusi Pemikiran Lewat Ikatan Ilmu", *Sabili*, No. 01 Th. X 25 Juli 2002/14 Jumaidi al-Awal 1423.
- Effendi, Bahtiar, *Teologi Baru Politik Islam Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Al-Gazali, Hamid Abdul. *Pilar-pilar Kebangkitan Umat: Telaah Ilmiah terhadap Konsep Pembaharuan Hasan al-Banna*, terjemahan, Khozin Abu Faqih dan Fachruddin, cet. I, Jakarta: al-Itishom Cahaya Umat, 2001.
- Al-Hajaji, Anas. *Otobiografi Hasan al-Banna tokoh pejuang Islam*, alih bahasa, Bahrun Abu Baker dan Anwar Rasyid, cet. I, Bandung: Risalah, 1983.
- Al-Hudaibi, Hasan, *Ikhwanu al-Muslimin Mengajak Buka Menghakimi*, terjemahan, Afif Mohammad, cet. II, Bandung: Pustaka, 1994.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian terhadap Hermeneutika*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- A.Hikam, M. "Negara Masyarakat Sipil Dan Gerakan Keagamaan Dalam Politik Di Indonesia" dalam *Prisma*, No. 3, thn xx, Maret, 1991.
- Isjwara F, *Pengantar Ilmu Politik*, cet. I, Bandung: Angkasa, 1980.
- Kamus besar Bahasa Indonesia cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Khan, Qamaruddin. *Pemikiran Politik Ibn Taymiyah*, terjemahan, Saidi al-Kamil, Bandung: Pustaka, 1983.
- Lubis, Solly M. *Ilmu Negara*, cet. I, Bandung: Angkasa, 1980.
- Malik, Djamaluddin Dedy & Ibrahim Subandy Idi, *Zaman Baru Islam: Pemikiran Dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Nurcholish Madjid, dan Jalaluddin Rahmat*, cet. I Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.

- Masykuri Abdillah, *Gagasan dan Tradisi Bernegara*, cet. I, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Muzaffari, Mehdi. *Kekuasaan Dalam Islam*, terjemahan, Abdul Rahman Ahmed, cet. I, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994.
- Novianto Khalid, *Era baru Indonesia: Sosialisasi Pemikiran Amien Rais, Hamzah Haz, Matori Abdul Jalil, Nur Mahmudi, dan Yusril Ihza Mahendra*, cet. I, Jakarta: Raja grafindo, 1999.
- Purnomo, Hadi, Syaikhul, dkk, *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi*, Surabaya: BP3 Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 1989 Qutb, Sayyid. *Keadilan Sosial dalam Islam*, terjemahan: Afif Mohammad, cet. II, Bandung: Pustaka, 1984.
- Qutb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, terjemahan, Afif Mohammad, cet. II, Bandung: Pustaka, 1984.
- Rahnema, Ali, *Para Peristiwa Zaman Baru*, alih bahasa, Ilyas Hasan cet. III, Bandung: Mizan, 1980.
- Rais Amien M. *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, cet. III, Bandung: Mizan, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Tidak ada Negara Islam*, dalam Agus Edisantoso (peny.), *Tidak Ada Negara Islam: Surat-surat Politik Nurcholis Madjid-Muhamad Roem*, Jakarta: Djambatan, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Pandangan tentang Negara Islam*” cet. II, Bandung: Mizan, 1990.
- Sagiv, David. *Islam Otentisitas Liberalisme*, cet. I, Yogyakarta, LKiS, 1997
- Sulaiman, Munandar, M, *Dinamika Masyarakat Transisi Yogyakarta*: Pustaka Pelajar, 1998.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1995.
- Sjadzali, Munawwir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah, dan Pemikiran*, cet. V, Jakarta: UI Press, 1993.
- Voll Obert, John, *Islam, Kelangsungan Dan Perubahan Di Dunia Modern*, terjemahan Ajat Sudrajat, Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1997.

Al-Wakil Sayyid, Muhammad, *Pergerakan Islam Terbesar Abad ke-14 H: Studi Analisis terhadap Manhaj Gerakan Ikhwanu al-Muslimin*, terjemahan: Fahrudin, cet. I, Bandung: asy-Syamil Press dan Grafika, 2001.

Wahid, Abdurrahman, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, Jakarta: Raja Grafindo, 1999.

\_\_\_\_\_, *Gus Dur Diadilii Kiyai-kiyai*, cet. I Surabaya: Jawa pos Press, 1989.

\_\_\_\_\_, *Tabayun Gus Dur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, dan Reformasi Kultural*, Yogyakarta: LKiS, 1998.

Zahrah, Muhammad Abu, *Aliran-aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam*, terjemahan Abdur Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, cet. I, Jakarta: Logos, 1996.

Zaidan, Karim, Abdul, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, alih bahasa, Abd Aziz, cet. I, Jakarta: Yayasan al-Imam, 1998.

## Lampiran I

NO	BAB	HAL	Terjemahan
1	II	47	Hai orang-orang yang beriman ta'atilah Allah dan Rasul-Nya dan Ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu beralih pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya
2	IV	92	Tiada Tuhan selain Allah

## Lampiran II

### Biografi Ulama dan Sarjana

#### 1. **Abdul Wahab Khallaf,**

Lahir di Kafruzziyat, bulan Maret 1888 M. masuk al-Azhar tahun 1900. Tahun 1920, beliau ditunjuk menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyah. Menjadi guru besar di fakultas Syari'ah al-Azhar tahun 1934-1948. Beliau wafat pada bulan Januari 1956. Di antara karya-karyanya adalah "*Ilm al-Usul al-Fiqh, Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyah dan al-Waqf wa al-Mawaris*".

#### 2. **M. Amien Rais**

Dilahirkan di Solo 26 April 1944, beliau memperoleh gelar Sarjana Muda dari Fakultas Tarbiyah BELIAUIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1967), dan Sarjana Fakultas Ilmu sosial dan Politik dari Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta 1968. kemudian beliau melanjutkan studi dan meraih gelar M.A dari Universitas Notre Dame, Amerika Serikat (1974), dan Ph.D.dari Universitas Chicago, Amerika Serikat (1981), dalam Ilmu Politik. Sempat menjadi mahasiswa luar biasa di Universitas al-Azhar, Mesir (1978-1979), sambil melakukan penelitian beliau untuk menulis disertasinya. Beliau juga mengajar di FISIPOL UGM, Universitas Islam (UI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dan beberapa Universitas lainnya. Pernah menjabat Ketua Umum PP. Muhammadiyah, Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesbeliau, ketua Partai Amanat (PAN) dan menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Beberapa karyanya antara lain; *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta, Tauhid Sosbeliaul Strategi Baru Menggepur Kesenjangan*.

#### 3. **Munawir Sjadzali**

Lahir di Klaten pada 7 November 1925, adalah Mantan Menteri Agama RI pada Kabinet Pembangunan Periode 1983-1988. setelah mengikuti pendidikan Madrasah Menengah Pertama atau Tinggi Islam Mambaul Ulum, Solo, Belbeliauu melanjutkan studi ke Universitas Exeter, Inggris, dan Universitas Georgetown Amerika Serikat. Disamping itu Belbeliauu, pernah mengikuti kursusdiplomatik dan konseler Departemen Luar Negeri. Pada tahun 1944-1945 menjadi Guru Basar Islam, Gunung Pati, Ungaran, Semarang, dan ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan di berbagai tugas (1945-1949). Pada tahun (1950) bekerja di Departemen Luar Negeri dan di tempatkan pada Seksi Arab-Timur Tengah. Setelah menyelesaikan tugas belajarnya di Inggris (1953-1954) Beliau diperbantukan pada Sekretaritt Bersama Konfrensi Asbeliau Afrika, di Jakarta ( 1954-1955 ), lalu menjadi atase kemudian beliau menjadi sekretaris tiga pada KBRI di Washington DC, Amerika Serikat ( 1956-199 ), dan sejak tahun 1959-1976 banyak berada di luar negeri sewaktu bekerja di Departemen Luar Negeri. Pada

tahun 1976-1980 beliau menjadi Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh pada RI untuk Emirat Kuwait merangkap Bahrain, Qatar, dan Perserikatan Keamiran Arab. Sejak tahun 1980 beliau diangkat menjadi staf ahli Menteri Luar Negeri di samping juga menjabat Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri (1980-1983). Di antara karyanya adalah: *Islam dan Tata Negara seharah dan Ajara-ajaran, Ijtihad Kemanusbeliau*.



### Lampiran III

#### BIODATA PENYUSUN

Nama : Puad Mawardi

Tempat& Tanggal Lahir : Jakarta 11- Nov 1979

Alamat Asal : Jl. Ciliwung Rt. 07/06 No. 52 Condet Kel. Cililitan Jakarta- Timur

Alamat Sekarang : Pengok PJKA Blok K Gk 1 No.412 Yogyakarta

Nama Orang Tua

Bapak : Muh. Rotib

Ibu : Maisarah

**Pekerjaan Orang tua**

Bapak : Wiraswasta

Ibu : Wiraswasta

#### Jenjang Pendidikan

1. SD Negeri 01 Kramat Djati 1986-1993
2. MTs Sunan Pandan Aran 1993-1996
3. MA Sunan Pandan Aran 1996-1999
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum 1999-Sekarang